

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah pembangunan ekonomi setiap negara merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan adanya pembangunan disuatu negara dapat menambah penerimaan perkapita penduduk dalam jangka panjang dan menciptakan masyarakat sejahtera (Arsyad, 1999). Peningkatan ekonomi diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan melainkan mampu mendorong penurunan kemiskinan, ketimpangan pengangguran (Kuncoro, 1997). Menurut Tadoro dan Smith (2011) peningkatan pertumbuhan bukan satu-satunya tujuan pembangunan, melainkan upaya saran penyediaan lapangan kerja untuk mencapai pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kesejahteraan.

Menurut Rivallion (1997), bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi akan membatasi adanya kesejahteraan masyarakat, dimana setiap aspek-aspek dalam perekonomian akan terhambat akibat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi akan menjadi hambatan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang direpresentasikan oleh kebutuhan minimum dari standar hidup tertentu. Sejalan dengan pandangan Meng et al., (2005) menyatakan bahwa, kemiskinan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk mendorong pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang rumit dan saling bertentangan, hal tersebut disebabkan karena pengentasan kemiskinan memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun upaya tersebut tidak cukup karena upaya peneliti sebelumnya telah mencoba menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang secara sistematis dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni kelompok yang berfokus pada ketidak mampuan individu dalam meningkatkan distribusi pendapatan. Pertumbuhan sebagai indikator makro ekonomi berperan penting dalam peningkatan terhadap struktur dari perekonomian suatu daerah (Barradi dan Marzo, 2017). Dengan demikian, semua negara baik negara maju maupun berkembang, berupaya mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai solusi utama menyusutnya perekonomian dalam negerinya (World Bank, 2023).

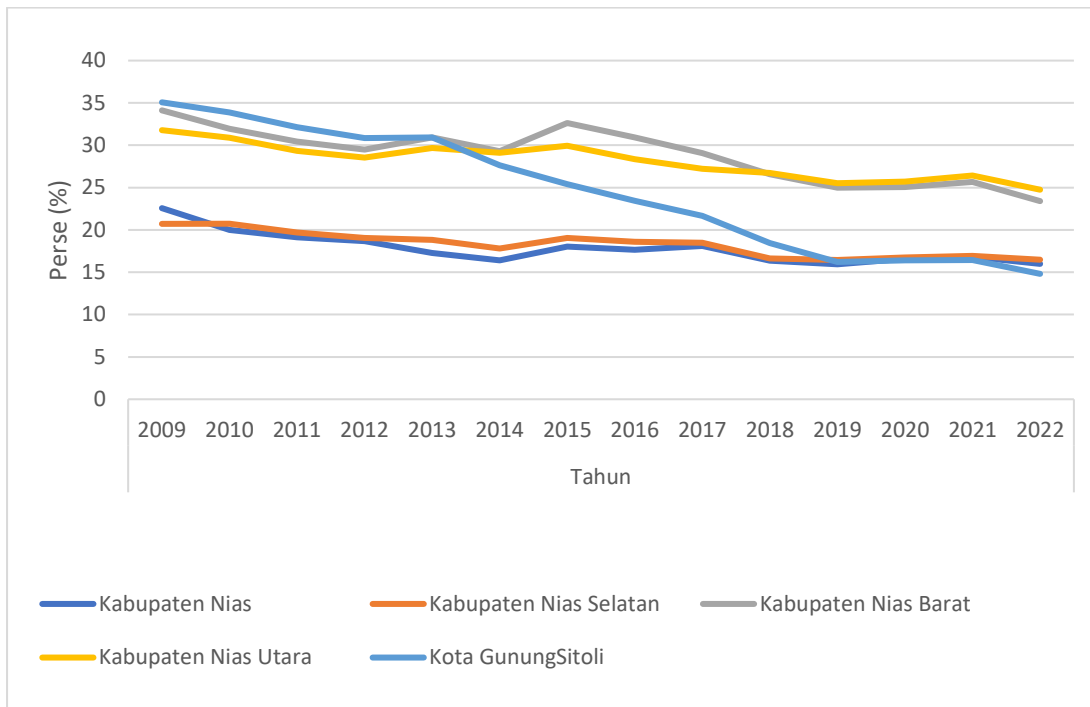
Faktor yang sering dihadapi oleh banyak negara berkembang ialah permasalahan jumlah pengangguran yang tinggi. Kondisi ini terjadi disebabkan banyaknya angkatan kerja namun

belum tersedia lapangan pekerjaan yang memadai, pengangguran yang tinggi berdampak pada penurunan produktifitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu negara menurun, hal ini akan menyebabkan terjadinya beban fiskal, penurunan pendapatan dan peningkatan beban belanja untuk kesejahteraan, kemudian beban fiskal yang lebih tinggi akan menurunkan investasi pemerintah sehingga menghambat kapabilitas pertumbuhan dimasa depan (Castells Quintana & Royuela, 2012).

Indonesia merupakan negara berkembang dan termasuk kedalam klasifikasi negara dengan penduduknya berpendapatan menengah kebawah dan belum terlepas dari masalah kemiskinan, ketimpangan, tingkat pengangguran yang tinggi. Meskipun telah dilakukan upaya dalam penanggulangan kendala tersebut akan tetapi masih belum terlaksana secara maksimal pemerataan pembangunan masih belum menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat perekonomian. Saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, dengan tujuan percepatan pembangunan wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi ketimpangan. Akan tetapi beberapa daerah di Indonesia masih menjadi bagian dari daerah dengan klasifikasi daerah tertinggal dalam Perpres No. 63 Tahun 2020, salah satu daerah di Indonesia yang tergolong sebagai daerah tertinggal mencakup seluruh daerah di Kepulauan Nias.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun (BPS) 2009 hingga tahun 2022, pada Grafik 1.1 persentase angka penduduk miskin di Kepulauan Nias menunjukkan bahwa adanya penurunan terhadap persentase tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi persentase penurunan kemiskinan setiap tahunnya mengalami perlambatan, dimana rata-rata angka penurunan 0,75 persen setiap tahunnya. Meskipun Kota Gunungsitoli terjadi penurunan yang di tahun 2013 sampai tahun 2018 dimana dari 30,84 persen turun drastis menjadi 18,0 persen, namun mengalami perlambatan ditahun berikutnya. Tingkat kemiskinan di Kepulauan Nias masih tergolong tinggi secara rata-rata kabupaten dan kota 33,63 ribu penduduk masih berada dibawah garis kemiskinan.

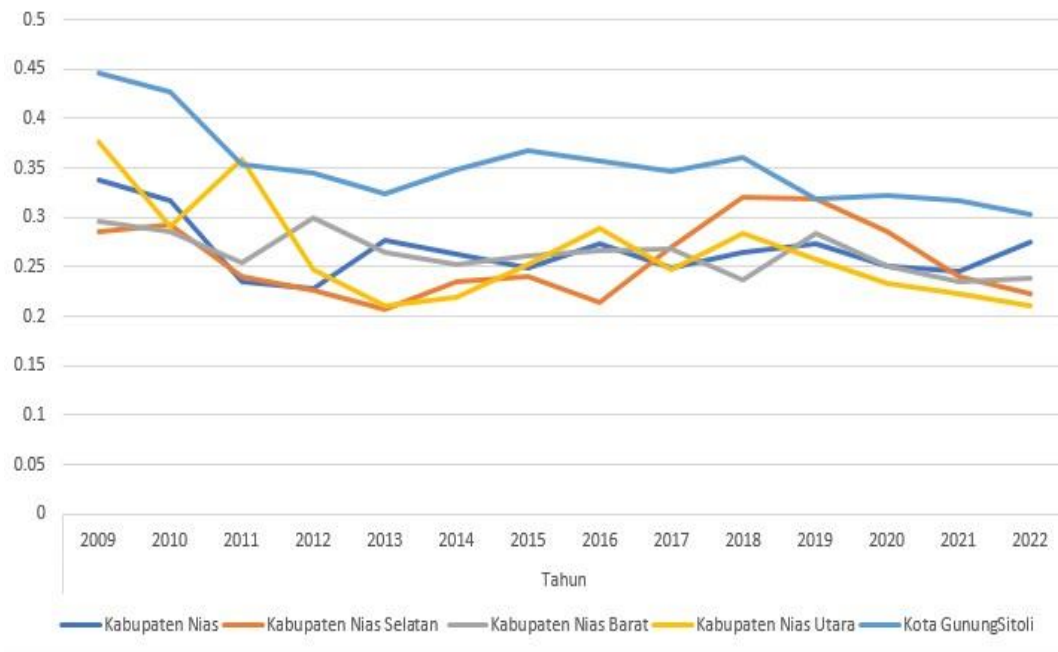
Grafik 1.1 Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias Tahun 2009-2022 (Persen)



Sumber : BPS, Sumatera Utara dalam Angka 2009-2022, (diolah)

Faktor berikutnya adalah permasalahan ketimpangan pendapatan, kondisi ini terjadi karena adanya kesenjangan pendapatan antarwilayah yang berdampak pada penurunan produktifitas masyarakat didaerah tersebut, tingginya ketimpangan juga dapat menggambarkan bahwa upaya pemerintah dalam penanggulangan ketimpangan belum tercapai, ketimpangan pendapatan diwilayah Kepulauan Nias masih belum teratasi sejak tahun 2009 hingga 2022. Ketimpangan yang diukur berdasarkan Gini rasio pada tiap tahunnya tidak mengalami penurunan yang signifikan, data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa Kota Gunungsitoli nilai Gini rasio 0,35, kemudian Kabupaten Nias Gini rasio bernilai 0,26, Kabupaten Nias Selatan Gini rasio 0,25, Kabupaten Nias Barat nilai Gini rasio 0,26, dan Kabupaten Nias Utara Gini rasio 0,26, data tingkat ketimpangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

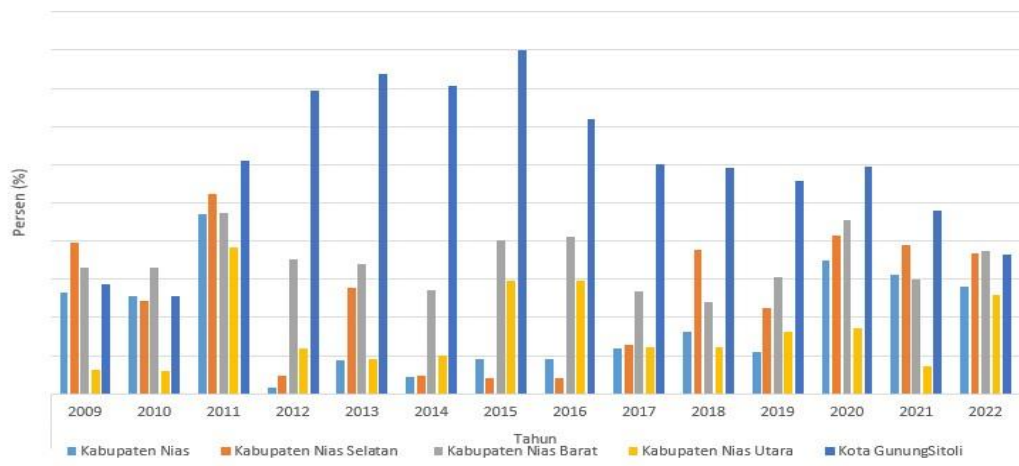
Grafik 1 2 Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias Tahun 2009-2022 (Persen)



Sumber :BPS, Sumatera Utara dalam Angka 2009-2022, (diolah)

Tingginya tingkat pengangguran berdasarkan data dalam Grafik 1.3 data BPS tahun 2009-2022, menunjukkan angka yang menurun selama beberapa tahun terakhir, dibandingkan kondisi tersebut sebelumnya menunjukkan kondisi yang tertinggi dan paling ekstrim yaitu kondisi tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Gunungsitoli pada tahun 2015 mencapai 9,0 persen, dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan secara signifikan dan kemudian ditahun berikutnya mengalami penurunan. Ketidakstabilan terhadap pengentasan tingkat pengangguran di Kepulauan Nias tampak pada tahun 2022 terakhir dimana menunjukkan bahwa secara rata-rata persentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nias sebesar 1,9 persen, Kabupaten Nias Barat 3,5 persen, Kabupaten Nias Utara 1,7 persen, Kabupaten Nias Selatan 2,5 dan Gunungsitoli sebesar 6,0 persen. Berdasarkan Grafik 3.1 menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran daerah terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga terjadi penumpukan masyarakat yang menganggur dan tergolong angkatan kerja pada suatu daerah.

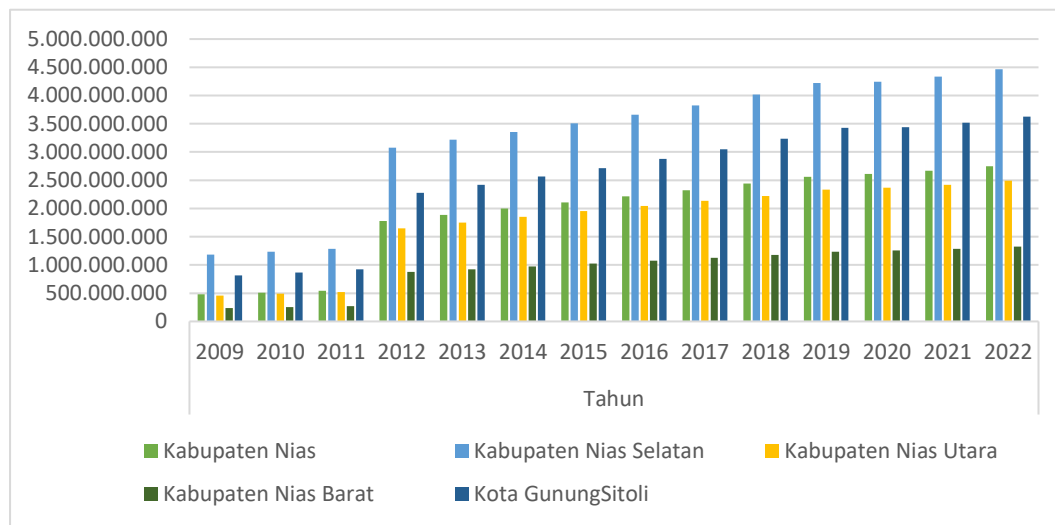
Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran di Kepulauan Nias Tahun 2009-2022 (Persen)



Sumber : BPS, Sumatera Utara dalam Angka 2009-2022, (diolah)

Pencapaian kinerja perekonomian daerah di Kepulauan Nias dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan pertumbuhan. Berdasarkan data BPS Sumatera Utara selama sepuluh tahun terakhir terdapat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada tahun 2022 Kabupaten Nias Selatan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai 4.466,09 miliar rupiah dan merupakan daerah dengan pendapatan tertinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, kemudian Kabupaten Nias Barat memperoleh pendapatan PDRB harga konstan sebesar 1.324,38 miliar rupiah yang merupakan kabupaten dengan PDRB terendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu Kabupaten Nias mencapai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 2.748,38 miliar rupiah, Kabupaten Nias Utara nilai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 2.490,49 miliar rupiah, Kota Gunungsitoli mencapai nilai pendapatan PDRB harga konstan 3.628,53 miliar rupiah, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat peningkatan hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi mengalami peningkatan. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.4 Produk Domestik Regional Bruto di Kepulauan Nias Tahun 2009- 2022 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPS, Sumatera Utara dalam Angka 2009-2022, (diolah)

Akan tetapi jika ditinjau kembali peningkatan terhadap PDRB di Kepulauan Nias tersebut tidak sebanding dengan penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran sehingga diperlukan konsep pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori-teori ekonomi terkini yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Kebijakan seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pengangguran diperlukan (Todaro & Smith, 2011).

Rahmadi & Parmadi (2019) dalam penelitiannya yang menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia, menunjukkan bahwa ketimpangan yang diukur dengan koefisien Gini dan kemiskinan yang diukur dengan jumlah penduduk miskin di wilayah kepulauan Indonesia berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Padang & Murtala (2020) dalam penelitiannya menggunakan analisis data panel periode waktu 5 tahun yakni tahun 2015-2019 dari 34 provinsi di Indonesia dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa perubahan jumlah penduduk miskin di Indonesia mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan seiring bertambahnya jumlah penduduk miskin dan menurunnya pertumbuhan ekonomi, maka perubahan tingkat

pengangguran mempunyai dampak yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Yuniarti et al., (2020) dalam penelitiannya tentang menggali faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia selama periode observasi tahun 2018, dengan analisis regresi linear berganda menemukan bahwa kemiskinan, ketimpangan, dan indeks pembangunan manusia tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akan tetapi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran yang terbukti secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kepulauan Nias yang masih tergolong dalam daerah miskin dengan tingkat pendapatan jauh dibawah perekonomian nasional. Melihat fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan ekonomi yang berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pengentasan ketertinggalan daerah dengan mencakup seluruh golongan masyarakat (Departemen Sosial RI, 2005). Berdasarkan gagasan RPJN tahun 2010, yakni kebijakan yang berfokus pada percepatan perbaikan kawasan Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dalam bentuk dukungan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat tertinggal (Bappenas & KPPN, 2020).

Kepulauan Nias yakni termasuk wilayah kawasan Sumatera Utara, tidak dipungkiri dari masalah tingkat kemiskinan, ketimpangan, pengangguran yang tinggi. Upaya pengentasan permasalahan ekonomi yang terjadi tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan terhadap perekonomian, ketertinggalan menjadi hambatan utama dalam upaya tersebut oleh sebab itu diperlukan analisis dalam melihat fenomena yang terjadi, secara fakta empiris yang terjadi tidak sejalan dengan teori sehingga artinya ada perbedaan (*gap*) dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kepulauan Nias?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi daerah di Kepulauan Nias terkait pengambilan keputusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi tambahan bagi penelitian berikutnya terutama analisis terhadap perekonomian daerah, sehingga adanya penelitian lebih mendalam tentang ekonomi daerah.

